

DISTRIBUSI STANDAR NASIONAL INDONESIA KEPADA MASYARAKAT MELALUI LAYANAN PERPUSTAKAAN

The Distribution of National Standard of Indonesia to Community through Library Services

Abdul Rahman Saleh, Erni Sumarni, Nihayati dan Muhamad Bahrudin

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT I, Lantai 11, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: abdulr_saleh@bsn.go.id

Diterima: 30 Mei 2016, Direvisi: 18 Juli 2016, Disetujui: 25 Juli 2016

Abstrak

Standar Nasional Indonesia merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Salah satu cara distribusi SNI kepada masyarakat adalah melalui PNBPN. Cara ini mengatur pengguna mengganti biaya reproduksi senilai tertentu sesuai Peraturan Pemerintah tentang PNBPN (PP No. 62 Tahun 2007). Penelitian ini dimaksudkan menganalisis permintaan SNI oleh pemangku kepentingan melalui PNBPN selama 2012-2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui distribusi SNI kepada masyarakat selama 2012-2015 dan mengetahui judul-judul SNI lama yang dibutuhkan masyarakat sehingga perlu dikaji ulang. Data distribusi SNI diperoleh dari basis data transaksi distribusi SNI di Pusido. Data diolah dengan bantuan pivot table dari excel. Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah SNI yang terdistribusi melalui PNBPN selama 2012-2015 adalah 4649 judul (53,3 %). Jumlah SNI lama (berusia lebih dari 5 tahun) yang banyak diminta oleh masyarakat yaitu 68,9 %.

Kata kunci: standardisasi, SNI, Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, BSN.

Abstract

The National Standard of Indonesia is a standard set by the National Standardization Agency of Indonesia. One way of SNI distribution to the public is through non-tax state revenues. This way arranged a user to reimburse the costs of reproduction with a certain amount of non-tax revenues correspond Government Regulation (PP. Num. 62-2007). This study aimed to analyze the demand SNI requested by stakeholders through non-tax revenues during 2012-2015. The purpose of this study was to determine the distribution of SNI to the society for 2012-2015 and knowing the old SNI titles that are still needed by the community so that the SNI needs to be reexamined. SNI distribution data obtained from the database of transactions in Pusido. The data was processed Excel pivot table. The study found that the number of SNI distributed through non-tax revenues during 2012-2015 are 4649 titles (53.3%). The amount of old SNI (over 5 years old) is still in demand by the public is about 68.9%.

Keywords: Standards, SNI, Indonesian National Standard, National Standardization Agency, BSN.

1. PENDAHULUAN

Istilah standar mengacu pada persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/kesepakatan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya (Badan Standardisasi Nasional, 2015). Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan

mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang saat ini bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi.

BSN menetapkan produk standar yang disebut Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BSN berperan meningkatkan budaya standar dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unit kerja BSN

yang berperan dalam penyebarluasan SNI guna meningkatkan budaya standar adalah perpustakaan. Perpustakaan BSN mengelola koleksi dokumen standar, baik SNI maupun standar internasional seperti ISO, IEC, ASTM dan lain-lain.

Dokumen standar yang merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan belum populer bagi banyak perpustakaan. Terbukti banyak perpustakaan yang belum menjadikan dokumen standar tersebut sebagai salah satu koleksinya. Dokumen standar merupakan dokumen yang berisi ketentuan atau spesifikasi atau suatu persyaratan tertentu yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Pengertian yang lebih spesifik adalah dokumen yang berisi spesifikasi teknis yang dibuat berdasarkan kesepakatan (konsensus) para pengguna (stakeholders) suatu barang/jasa dan digunakan secara berulang (Badan Standardisasi Nasional, 2015). Perpustakaan BSN merupakan perpustakaan yang salah satu tugasnya adalah melayani distribusi dokumen SNI kepada masyarakat khususnya yang menjadi pemangku kepentingan bidang standardisasi.

Jumlah koleksi SNI perpustakaan BSN sejumlah 10.660 SNI pada tahun 2015. Sebagian dari SNI tersebut sudah diabolisi atau ditarik dari peredaran karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik ilmu pengetahuan, teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Jumlah SNI yang diabolisi sejumlah 1.866 SNI. SNI yang aktif dan dapat digunakan oleh masyarakat sejumlah 8.794 SNI. Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperoleh informasi bahwa banyak SNI lama yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, padahal SNI yang sudah berumur 5 tahun seharusnya sudah dikaji ulang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak SNI lama dengan umur tertentu yang masih dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peta permintaan SNI selama 2012-2015, mengetahui SNI yang tidak pernah diminta selama 2012-2015, mengetahui peta pengguna SNI sesuai dengan kelompok pemangku kepentingan, dan merekomendasikan SNI yang perlu dilakukan kaji ulang yang difasilitasi melalui layanan PNPB perpustakaan BSN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut SNI 7496:2009, perpustakaan khusus instansi pemerintah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.

Berdasarkan misi tersebut diperlukan adanya dukungan untuk perpustakaan khusus instansi pemerintah dengan memiliki fungsi berikut:

- a. Mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya.
- b. Menyimpan semua terbitan yang berkaitan dengan lembaga induknya.
- c. Menjadi *focal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya.
- d. Menjadi pusat referal dalam bidang yang sesuai dengan lembaga induknya.
- e. Mengorganisasi materi perpustakaan.
- f. Mendayagunakan koleksinya.
- g. Menerbitkan literatur sekunder dan tersier dari lembaga induknya, baik cetak maupun elektronik.
- h. Menyelenggarakan pendidikan pada penggunanya.
- i. Menyelenggarakan kegiatan literasi informasi untuk pengembangan kompetensi SDM lembaga induknya.
- j. Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif.
- k. Berpartisipasi dalam kerjasama perpustakaan dan jaringan informasi.
- l. Menyelenggarakan otomasi perpustakaan.
- m. Melaksanakan digitalisasi materi perpustakaan.
- n. Menyajikan layanan koleksi digital.
- o. Menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global (Badan Standardisasi Nasional, 2009).

Terkait dengan hal tersebut, Perpustakaan BSN yang termasuk jenis perpustakaan khusus instansi pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yang relevan terkait perannya mendistribusikan SNI sebagai proses penyebarluasan SNI untuk meningkatkan budaya standar kepada masyarakat. Fungsi yang terkait dengan tugas Perpustakaan BSN tersebut adalah untuk memberikan jasa perpustakaan dan informasi serta untuk menjadi *focal point* dari informasi terbitan lembaga induknya. Penelitian ini berfokus pada peran Perpustakaan BSN dalam mendistribusikan SNI melalui layanan PNPB kepada masyarakat.

Dokumen standar merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan yang termasuk kelompok literatur primer (Saleh & Mustafa, 2009). Namun demikian, tidak banyak

perpustakaan yang menyadari pentingnya peran dokumen standar dalam mendukung referensi informasi bidang industri dan perdagangan. Saat ini, ketika era perdagangan bebas dimulai, standar memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa yang diperdagangkan.

Standar didefinisikan secara umum sebagai ukuran tertentu yg dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga), atau baku (Pusat Bahasa, 2008). Pengertian standar yang lebih spesifik dikatakan Sunarya bahwa standar merupakan dokumen tertulis yang berisi spesifikasi/ketentuan teknis yang digunakan secara berulang dan disepakati secara konsensus oleh pihak-pihak yang memengaruhi pasar (produsen dan konsumen) yang melibatkan fasilitator, yaitu regulator dan para pakar (Sunarya, 2012). Saat ini, peran standar semakin dirasakan sangat penting terutama dalam rangka meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan. Selain itu, kontribusi istimewa standar diantaranya untuk melindungi masyarakat terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup atau yang dikenal dengan K3L. Penggunaan standar secara umum memberikan manfaat yaitu:

1. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik dan internasional untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan melalui harmonisasi standar.
2. Membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi, khususnya pada kalangan usaha kecil dan menengah di banyak negara termasuk negara-negara berkembang.
3. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus pada mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.
4. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.
5. Optimalisasi infrastruktur standarisasi (Badan Standardisasi Nasional, 2014)

Penerapan standar merupakan kegiatan menerapkan persyaratan standar terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personel. Suatu standar dibuat melalui kesepakatan atau konsensus, bersifat *voluntary* (sukarela) (Badan Standardisasi Nasional, 2014). Penerapan standar secara *voluntary* didasarkan oleh inisiatif dari organisasi/personel sendiri. Tentunya upaya untuk menerapkan standar tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberi jaminan bahwa produk sesuai dengan keinginan

konsumen karena menginginkan produk dengan mutu tertentu. Hal ini menunjukkan penerapan standar akan memberikan kontribusi nyata terhadap keuntungan suatu organisasi dan meningkatkan daya saing produk. Namun, adakalanya standar yang dikeluarkan terkait dengan faktor keselamatan, keamanan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup. Standar yang dimaksud dapat diberlakukan secara wajib (*mandatory*). Berbeda dengan penerapan standar secara *voluntary*, standar yang diberlakukan wajib bersifat mengikat. Artinya, harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terkait, yaitu produsen, pedagang barang/jasa atau pengguna standar lainnya. Pemberlakuan standar secara wajib diatur oleh suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (regulator/kementerian/lembaga).

Berdasarkan lingkup operasionalnya maka standar dapat digolongkan menjadi standar individu, standar perusahaan, standar asosiasi, standar nasional, standar regional, dan standar internasional (Badan Standardisasi Nasional, 2009). SNI merupakan standar yang memiliki ruang lingkup operasi di tingkat nasional yaitu Republik Indonesia. Pengguna Standar Nasional Indonesia (SNI) terdiri dari empat kelompok yaitu: pelaku usaha/industri, pemerintah/regulator, pakar dan akademisi, dan masyarakat umum termasuk konsumen.

Pengguna tersebut dapat memperoleh dokumen SNI dari berbagai saluran yang berujung di Perpustakaan BSN. BSN melalui perpustakaanannya mendistribusikan SNI ke masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan, seperti sekretariat komite teknis, kementerian/lembaga, universitas yang memiliki kerjasama dengan BSN, dan lain-lain.

PNBP adalah singkatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. PNBPN merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh kementerian/lembaga pemerintah sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang memengaruhi pendapatan negara yang merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang (Wikipedia, 2015). Penyelenggaraan PNBPN ini dilakukan terhadap layanan-layanan yang belum mampu dibiayai oleh negara melalui APBN. Instansi pemerintah penyelenggara PNBPN mengenakan biaya terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. BSN memberikan layanan reproduksi SNI kepada masyarakat dengan PNBPN yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang jenis dan tarif

atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku.

Penelitian ini pada dasarnya mengacu pada konsep pemanfaatan koleksi perpustakaan. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan obyek beragam mulai dari buku teks, buku referensi hingga majalah. Penelitian tentang pemanfaatan koleksi majalah ilmiah pernah dilakukan Prawati tentang keterpakaian koleksi majalah ilmiah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian oleh peneliti Badan Litbang Pertanian. Responden berjumlah 53 orang. Penelitian tersebut menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling*, yaitu memilih responden secara *accidental*. Penentuan sampel dihitung berdasarkan rumus T Yamane dengan presisi $\pm 5\%$ dan tingkat kepercayaan 95% ($z = 1,96$), sehingga diperoleh sampel 47 orang (Prawati, 2003). Penelitian serupa pun pernah dilakukan oleh Bektiningsih tentang pemanfaatan koleksi referensi sebagai bahan rujukan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan variabel yang digunakan adalah variabel tunggal. Maksudnya, variabel yang digunakan adalah pemanfaatan koleksi referensi di Perpustakaan UGM sebagai bahan rujukan oleh mahasiswa (Bektiningsih, 2008).

Perpustakaan yang memiliki jumlah koleksi yang besar (*large library*) bukan faktor yang menentukan dalam hal pemanfaatan koleksi perpustakaan. Besarnya nilai koleksi perpustakaan (*great library*) dalam artian koleksi memiliki relevansi dengan kebutuhan pengguna adalah faktor utama yang akan menentukan tingkat pemanfaatan koleksi oleh sivitas akademika (Ratcliffe dalam Bektiningsih, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 2005), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi termasuk hubungan, kegiatan, sikap pandangan dan proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari suatu fenomena (Hasan, 2004). Pada penggunaan metode deskriptif, peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif.

Menurut Nazir (2005), penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif

yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar perbandingan, karena penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol. Metode penelitian komparatif merupakan *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab-akibat dari data yang tersedia.

3.1 Obyek Penelitian

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah transaksi permintaan Standar Nasional Indonesia yang diminta melalui kegiatan layanan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Proses permintaan SNI melalui layanan PNBPN dimulai dari permintaan dokumen SNI oleh pengguna secara online, surat (konvensional dan elektronik), telepon/faksimil, dan datang ke Perpustakaan BSN kemudian mengisi formulir (tercetak atau elektronik), membayar biaya reproduksi sesuai tarif PNBPN, dan menerima dokumen SNI yang dipesan.

3.2 Data Penelitian

Data penelitian berasal dari catatan transaksi permintaan yang berhasil dilayani dan tercatat dalam basis data Sistem Informasi Pustaka (SIM Pustaka). Data dari tahun 2012-2015 diambil dari basis data dan dikonversi dalam format excel. Perbandingan data diambil dari basis data seluruh koleksi dokumen SNI yang ada pada Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI).

3.3 Metode Pengolahan Data

Data nomor SNI yang berasal dari basis data SIM Pustaka memiliki format excel sehingga divalidasi penulisannya sesuai dengan penulisan basis data SISNI. Kolom data (nomor SNI) yang akan diolah dipindahkan ke lembar kerja (*sheet*) baru pada excel kemudian diberi nilai 1 pada kolom sebelah kanannya. Pada baris selanjutnya dipindahkan nomor SNI yang berasal dari basis data SISNI, kemudian diberi nilai 1 pada kolom sebelah kanannya. Selanjutnya, kedua kolom yang berisi data nomor SNI dan nilainya, diblok dan dijalankan perintah untuk mengeksekusi tabel pivot (tabel sumbu putar). Tabel pivot adalah tabel yang orientasinya diputar sehingga data yang tadinya merupakan baris diputar menjadi kolom. Pada tabel pivot excel, pemutaran sumbu tabel tersebut bukan hanya pemutaran sumbu saja, namun sekaligus dilakukan kalkulasi untuk item yang sama nilainya (dijumlahkan).

Tabel pivot tersebut akan terbentuk pada lembar kerja (*sheet*) lain. Jika nomor SNI yang ada pada tabel pivot bernilai lebih dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada transaksi permintaan terhadap SNI tersebut. Sebaliknya, jika nilai nomor SNI pada tabel pivot bernilai 1, maka dapat dipastikan bahwa SNI tersebut tidak pernah diminta selama periode dalam penelitian ini yaitu 2012–2015.

3.4 Metode Analisa Data

Hasil pengolahan menggunakan tabel pivot excel kemudian dibuat tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan antara item SNI yang bernilai 1 (tidak diminta) dengan item SNI yang bernilai lebih dari 1 (diminta) selama periode 2012-2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permintaan SNI melalui PNBPN selama empat tahun dari tahun 2012-2015 dilakukan oleh 2.998 pemangku kepentingan dengan 1.943 dari lembaga atau perusahaan dan 1.055 dari individu/pribadi. Jumlah transaksi yang dilakukan sebesar 16.257 permintaan SNI. Tabel 1 berikut memperlihatkan komposisi pemangku kepentingan yang melakukan transaksi permintaan SNI.

Tabel 1 Kelompok pemangku kepentingan pengguna SNI tahun 2012-2015.

Kelompok	Jumlah
Pelaku Usaha	1.605
Pemerintah/Regulator	181
Akademisi/Pakar	157
Masyarakat/Konsumen	1.055
Total	2.998

Sebagian besar permintaan SNI melalui PNBPN pada Perpustakaan BSN datang dari kelompok pelaku usaha yaitu sebesar 10.365 transaksi atau 63,76 % pada tahun 2012-2015. Diikuti oleh kelompok akademisi sebesar 2.513 transaksi atau sebesar 15,46 %. Posisi ketiga, permintaan dari instansi pemerintah dengan jumlah transaksi sebesar 2.324 atau 14,30 %, dan terakhir permintaan dari masyarakat umum atau konsumen yaitu sebesar 1.055 transaksi atau 6,49 %. Tabel 2 berikut memperlihatkan gambaran jumlah permintaan SNI dari masing-masing kelompok pengguna.

Tabel 2 Transaksi SNI berdasarkan pemangku kepentingan tahun 2012-2015.

Kelompok Pemakai	Jumlah Permintaan	%
Pelaku Usaha	10.365	63,76
Pemerintah	2.324	14,30
Akademisi	2.513	15,46
Masyarakat/Konsumen	1.055	6,49
Total	16.257	100

Dokumen SNI diperoleh melalui berbagai macam cara antara lain:

1. Pengunduhan satu tahun pertama semenjak SNI ditetapkan.
2. Permintaan pada Perpustakaan BSN dengan layanan PNBPN.
3. Sekretariat komite teknis yang ada di kementerian.
4. Saluran-saluran lain

Pemanfaatannya pun bermacam-macam tergantung dari jenis pemakainya, antara lain:

1. Referensi untuk menjamin mutu produk, seperti penerapan SNI dalam proses produksi, SMM, dan SNI Produk.
2. Acuan pengujian, sertifikasi SNI, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan *Multi Lateral Recognition Arrangement* (MLA).
3. Adopsi SNI menjadi regulasi teknis, berperan dalam penerapan SNI, pengawasan dan pembinaan.
4. Acuan/referensi penelitian, inovasi teknologi dan produk.
5. Referensi menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan.
6. Acuan/referensi pendidikan dan penelitian profesi (mahasiswa, dosen, peneliti, dan pustakawan).

Permintaan SNI yang dicatat oleh BSN paling lengkap melalui PNBPN. Data permintaan PNBPN pertahun selama 4 tahun terakhir (2012-2015) terlihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 terlihat bahwa SNI yang ditetapkan lebih dari lima tahun terakhir banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal menurut teori, suatu standar idealnya setiap lima tahun sekali dikaji ulang. Hal ini agar standar dapat terus sesuai dengan perkembangan jaman dari aspek perkembangan ilmu, teknologi, maupun aspek kebutuhan pasar.

Tabel 3 SNI yang diminta melalui PNPB periode 2012-2015 berdasarkan tahun penetapannya.

Tahun Penetapan SNI diminta	Jumlah SNI diminta pada Tahun				Total permintaan selama 4 tahun
	2012	2013	2014	2015	
1987	16	-	-	34	50
1988	-	31	33	-	64
1989	157	143	189	139	628
1990	35	-	-	25	60
1991	71	49	55	46	221
1992	75	157	152	95	479
1993	-	-	-	-	-
1994	61	54	29	47	191
1995	75	85	75	51	286
1996	90	74	61	225	450
1997	3	7	4	7	21
1998	110	132	110	105	457
1999	63	43	55	25	186
2000	116	158	94	70	438
2001	54	81	39	22	196
2002	154	168	95	91	508
2003	23	36	22	24	105
2004	34	61	40	59	194
2005	73	100	90	79	342
2006	60	55	38	60	213
2007	18	45	43	4	110
2008	75	103	74	105	357
2009	128	169	129	161	587
2010	77	102	70	117	366
2011	84	258	115	161	618
2012	29	131	91	135	386
2013	-	70	122	122	314
2014	-	-	58	118	176
2015	-	-	-	66	66

Berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat bahwa SNI yang ditetapkan pada tahun tertentu dan diminta pada tahun tersebut jumlahnya sangat sedikit. Hal ini tampak pada permintaan tahun 2012. SNI penetapan tahun 2012 yang diminta hanya berjumlah 29 SNI, padahal jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun 2012 berjumlah 311 judul SNI (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Sama halnya dengan tahun-tahun berikutnya, seperti pada tahun 2013, jumlah permintaan hanya 70 SNI; tahun 2014 hanya 58; dan tahun 2015 hanya 66 SNI. Berdasarkan hasil analisa, ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu:

1. SNI yang baru ditetapkan belum dikenal/diketahui atau diperlukan oleh masyarakat sehingga belum banyak diminta.
2. SNI dapat diperoleh secara gratis melalui *website* BSN.

Jika penyebab pertama yang terjadi, maka pihak BSN harus lebih gencar lagi mempromosikan SNI yang baru ditetapkan supaya masyarakat lebih cepat mengetahui dan menggunakannya. Namun demikian, penerapan standar baru biasanya tidak langsung menggantikan penerapan standar yang lama karena memerlukan proses dan penyesuaian-penyesuaian. Terutama pada penerapan standar di perusahaan atau lembaga yang telah

tersertifikasi dengan standar sebelumnya, karena itu, standar baru atau yang baru ditetapkan tidak diminta oleh masyarakat atau pengguna standar. Jika penyebab kedua yang terjadi, maka wajar jika pengguna standar tidak segera meminta via PNBPN karena pengguna dapat memperoleh dokumen standar baru tersebut secara gratis dengan mengunduhnya dari *website* BSN.

Dokumen SNI yang diminta pada kurun waktu 2012-2015, ada yang selalu diminta setiap tahun tetapi ada yang hanya diminta selama 1 tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Hal ini menyebabkan jumlah permintaan selama empat tahun tidak dapat langsung dijumlah dari permintaan masing-masing tahun, tetapi harus dilihat dari permintaan selama empat tahun. Jumlah tersebut adalah sebesar 4.691 judul dokumen SNI atau sebesar 44 % dari total judul SNI, atau 53,3 % terhadap SNI aktif, dengan total transaksi sebanyak 14.452 permintaan.

Menariknya, cukup banyak dokumen SNI yang tidak pernah diminta melalui PNBPN selama 4 tahun terakhir sejumlah 5.981 dokumen atau sebesar 56 % dari total SNI. Hal tersebut terjadi karena:

1. SNI sudah diabolisi sehingga tidak digunakan.
2. SNI sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan kebutuhan walaupun belum diabolisi.

3. SNI tidak dibutuhkan karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.

4. Pemakai tidak tahu bahwa SNI tersebut ada.

Tabel 4 Permintaan SNI tahun 2012-2015.

Tahun	Permintaan	Permintaan	Total Dokumen SNI
2012	Jml permintaan	1.681	9.337
	% thd total dokumen	18,0	
2013	Jml permintaan	2.312	9.765
	% thd total dokumen	23,7	
2014	Jml permintaan	1.883	10.161
	% thd total dokumen	18,5	
2015	Jml permintaan	2.193	10.661
	% thd total dokumen	20,6	

Jumlah transaksi permintaan SNI yang dipenuhi oleh Perpustakaan BSN selama periode 2012 – 2015 adalah sebesar 14.452 transaksi. SNI yang paling banyak diminta adalah SNI ISO/IEC 17025:2008 dengan judul “Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi”, dengan jumlah 266 permintaan.

Tabel 5 Sepuluh judul SNI paling banyak diminta selama 2012-2015.

No	Nomor SNI	Judul	Jumlah diminta
1	SNI ISO/IEC 17025:2008	Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi	266
2	SNI ISO 9001:2008(E)	Sistem manajemen mutu - Persyaratan	178
3	SNI ISO/IEC 17065:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa	141
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi	111
5	SNI 0225:2011	Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)	106
6	SNI ISO 9000:2008	Sistem manajemen mutu - Dasar-dasar dan kosa kata	72
7	SNI ISO 50001:2012	Sistem manajemen energi - Persyaratan dengan pedoman penggunaan	71
8	SNI ISO 15189:2012	Laboratorium medik - Persyaratan mutu dan kompetensi	66
9	SNI ISO/IEC 17021:2011	Penilaian kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen	64
10	SNI ISO 19011:2012	Panduan audit sistem manajemen	58

SNI yang paling banyak diminta selama tahun 2012-2015 ada 10 judul, hal ini diperlihatkan pada Tabel 5. Judul-judul SNI tersebut merupakan judul-judul SNI yang sangat populer. Terbukti, sebanyak lima judul SNI dari 10 judul tersebut diminta setiap tahun selama kurun waktu 2012-2015. Judul-judul tersebut adalah:

1. SNI ISO/IEC 17025:2008 (Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi).
2. SNI ISO 9001:2008(E) (Sistem manajemen mutu – Persyaratan).
3. SNI 0225:2011 (Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)).
4. SNI ISO 9000:2008 (Sistem manajemen mutu - Dasar-dasar dan kosa kata).
5. SNI ISO/IEC 17021:2011 (Penilaian kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen).

Empat judul SNI yang diminta setiap tahun selama tiga tahun pada kurun waktu 2012-2015 yaitu:

1. SNI ISO/IEC 17065:2012 (Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa).
2. SNI ISO/IEC 17020:2012 (Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi).
3. SNI ISO 50001:2012 (Sistem manajemen energi - Persyaratan dengan pedoman penggunaan).
4. SNI ISO 19011:2012 (Panduan audit sistem manajemen).

Hanya satu judul SNI dari 10 judul SNI terpopuler tersebut yang diminta setiap tahun pada dua tahun dalam periode 2012-2015 yaitu SNI ISO 15089:2012 dengan judul "Laboratorium medik - Persyaratan mutu dan kompetensi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah SNI yang diminta selama kurun waktu 2012-2015 berjumlah 4.691 judul SNI dari total 10.660 judul SNI atau dari 8.794 judul SNI yang aktif. Artinya, ada sebanyak 5.981 judul SNI yang tidak pernah diminta selama kurun waktu tersebut. Banyak SNI lama yang dibutuhkan masyarakat, terbukti banyak permintaan SNI dengan tahun di bawah 2010.

Pemangku kepentingan terbesar yang menggunakan SNI adalah kelompok pelaku usaha yaitu sebesar 1.605 pengguna, diikuti oleh

kelompok masyarakat umum yaitu sebanyak 1.055 pengguna, kemudian pemerintah atau regulator sebanyak 181 pengguna, dan akademisi sebanyak 157 pengguna.

Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan perlu dilakukan kaji ulang terhadap SNI yang usianya lebih dari 5 tahun, khususnya yang dibutuhkan oleh pengguna.

Perlu dipertimbangkan untuk mengabolisi SNI yang tidak pernah dibutuhkan oleh pemakai. Penelitian ini baru dilakukan terhadap permintaan SNI melalui PNBPN sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih menyeluruh dengan melibatkan data yang lebih luas seperti data distribusi SNI melalui pengunduhan dari basis data SISNI, data dari distribusi untuk komite teknis, data dari distribusi untuk pengguna internal BSN, data dari distribusi SNI yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar BSN, dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim atas dukungannya sehingga karya ini dapat disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bektiningsih, P. (2008). Pemanfaatan koleksi referensi sebagai bahan rujukan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4, 2, 22-31.
- Badan Standardisasi Nasional. (2007). PSN 01-2007 Pengembangan Standar Nasional. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). Pengantar standardisasi. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI 7496:2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). Pengantar standardisasi edisi ke 2. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). Manfaat ekonomi standar (economic benefit of standards). Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

- Badan Standardisasi Nasional. (2015). Laporan tahunan BSN. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). SNI dalam angka 2016. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Hasan, I. (2004). Analisis data penelitian dengan statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawati, B. (2003). Keterpakaian koleksi majalah ilmiah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian oleh peneliti Badan Litbang Pertanian. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 12, 1, 26-31.
- Pusat Bahasa. (2016). Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Diakses 25 Februari 2016 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>.
- Saleh, A. R., & Mustafa, B. (2009). Bahan Rujukan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sunarya. (2012). Standardisasi dalam industri dan perdagangan: konsep dan penerapan dalam globalisasi. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Wikipedia. (2016). Wikipedia: Ensiklopedia bebas. Diakses 25 Februari 2016 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak.

